

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

DISUSUN OLEH:

YOLLANDA ANDINI SARI

NIM : 01776201266



**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YOLLANDA ANDINI SARI
NIM : 01776201266
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH
 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2020

DISETUJUI OLEH :

PANITIA PENGUJI

KETUA

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

PENGUJI I

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
 NIP. 19751106 200710 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : YOLLANDA ANDINI SARI
NIM : 01776201266
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING

Ari Nur Wahidah SE., MM.
 NIP. 19780105 200710 2 092

DEKAN



Drs. H. Mub. Said. HM., M.Ag., MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI

Sahwitri Triandani, SE., M.Si.
 NIP. 19820806 200604 2 002

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

Oleh:

YOLLANDA ANDINI SARI
NIM : 01776201266

Tujuan penelitian ini dilakukan pada juni 2020 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota pekanbaru. Pajak air tanah adalah atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Data penelitian dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara hasil dari penelitian ini Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui. Analisis penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 berturut-turut 16,14% dan 17,16% dengan rata-rata 16,65%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak Air Tanah di kota Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 menunjukkan sangat efektif dengan rata-rata 101,805%. Dapat disimpulkan bahwa pajak Air Tanah sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru dan pemerintah kota Pekanbaru mampu dalam menggali potensi pajak Air Tanah secara maksimal sehingga tingkat analisis penerimaan pajak Air Tanah di kota Pekanbaru menunjukkan sangat efektif.

Kata Kunci : Pajak Air Tanah, Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU”** Shalawat beserta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya pada Program D3 Administrasi Prpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta , ayahanda Alm.Darius dan ibunda Almh.Evi Wati yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa sebelum bisa melihat saya mengenakan toga yang mereka impikan selama ini. Terimakasih atas do'a, curahan kasih sayang yang selalu dirindukan dan tetesan keringatnya hingga penulis bisa merasakan nikmat nya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan Studi ini dengan baik.
2. Untuk kakak dan abang tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. KH.Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.A.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu perguruan tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial atas segala bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M. Si selaku ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
6. Ibu Arie Nurwahidah SE, MM. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bang Riko selaku *account representative*, dan seluruh pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak memberikan data serta masukan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan saya khususnya Vijay Boyna Putra, Kharissa Dwi Fernanda, Nanda Novia, Fatmi Wahdini yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin, namun dalam penulisan ini juga di sadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari tahap kesempurnaan karna berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang. Disamping itu penulis juga berharap agar tugas akhir ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca yang haus akan ilmu pengetahuan

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Yollanda Andini Sari
01776201266

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM	8
2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	8
2.2 Visi dan Misi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	10
2.3 Uraian Tugas	11
2.4 Struktur Organisasi	27
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	15
3.1. Tinjauan teori.....	28
3.1.1. Pengertian Pajak	28
3.1.2. Ciri-ciri Pajak	29
3.1.3. Fungsi Pajak	29
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	31
3.1.5. Manfaat adanya Pajak.....	33
3.1.6. Jenis Pajak	33
3.1.7. Pendapatan Asli Daerah.....	37
3.1.8. Pajak Daerah	38
3.1.9. Pajak Air Bawah Tanah	44
3.1.10. Wilayah Pemungutan	48
3.1.11. Kontribusi	48
3.1.12. Efektivitas	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.13	Pandangan Islam Tentang Pajak	49
3.2.	Tinjauan Praktek	50
3.2.1	Kontribusi Penerimaan Pajak	50
3.2.2	Kendala Pemungutan Pajak	52
3.2.3	Upaya Bapenda	53
3.2.4	Kondisi Penerimaan Pajak	54
3.2.5	Perbandingan Teori dan Praktek	55
BAB IV	PENUTUP	57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019.	3
Tabel 1.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019.	3
Tabel 3.1	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru	51
Tabel 3.2	Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2018-2019.....	51
Tabel 3.3:	Perbandingan Teori dan Praktek dalam Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	27
------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Negara, baik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah, seperti, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah.

Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan, dengan adanya intensifikasi pajak daerah, diharapkan realisasi pajak daerah dapat meningkatkan yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. meningkatnya pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang memnuntut terpenuhinya kebutuhan akan air yang terus meningkat. lama kelamaan ketersediaan air akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya krisis air bersih. krisis air bersih ini dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros dalam memanfaatkan air. hal ini disebabkan karena air dianggap milik umum dan tidak terbatas. disamping peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan



di segala bidang,kerusakan lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berkurangnya sumber air bersih.

Air tanah merupakan bagian air dialam yang terdapat dibawah permukaan tanah.pembentukan air tanah mengikuti siklus peredaran air di bumi yang disebut daur hidrologi,yaitu proses alamiah yang berlangsung pada air dialam yang mengalami perpindahan tempat secara berurutan dan terus menerus. salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak air bawah tanah. Pajak air bawah tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial saat ini.menurut perda kota pekanbaru No 12 Tahun 2011 tentang pajak air bawah tanah,Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah (Perda No 12 Tahun 2011 tentang pajak air bawah tanah).

Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai Pajan Air Bawah Tanah No 12 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota No 78 Tahun 2018 maka sumber pendapatan daerah dari pajak Air Bawah Tanah tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan,sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.selain untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru,peraturan daerah mengenai pajak Air Bawah Tanah.tarif pajak Air Bawah Tanah sebesar 20% dan objek pajak Air Bawah maupun penggalian sedangkan subjek pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1: Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

NO	TAHUN	PENERIMAAN PAD(Rp)	PERTUMBUHAN (%)
	2018	573.154.196.274	17,00
2	2019	690.931.414.829	20,55

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pekanbaru pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dengan rasio pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 20,55%.

Tabel 1.2: Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019.

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2018	748
2	2019	1.079

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan table 1.1 bahwa jumlah wajib pajak air bawah tanah kota Pekanbaru pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 wajib pajak air bawah tanah adalah 748 wajib pajak. Selanjutnya pada tahun 2019 wajib pajak air bawah tanah 1.079 wajib pajak. Adanya peningkatan wajib pajak pada tahun 2019 karena Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan berbagai strategi salah satunya adalah Sosialisasi Daftar Tagih (SDT).

Tabel 1.3: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	90.440.898.825	92.517.148.946
2	2019	117.035.537.059	118.586.072.181

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak air bawah tanah di kota Pekanbaru yakni sebesar Rp 92.517.148.946 dari jumlah target sebesar Rp 90.440.898.825. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran kota Pekanbaru mengalami peningkatan yakni

sebesar Rp 118.586.072.181 dari jumlah target sebesar Rp 117.035.537.059. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah kota Pekanbaru pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan target pada tahun 2019. Peningkatan pada target pajak air bawah tanah terjadi karena Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru melihat potensi perkembangan pajak air bawah tanah di kota Pekanbaru yang semakin berkembang sehingga berpengaruh pada peningkatan wajib pajak dan penerimaan pajak air bawah tanah.

Berkembang pesatnya jumlah pajak air bawah tanah di kota Pekanbaru akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, kota Pekanbaru diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan cara meningkatkan pajak daerah khususnya pajak air bawah tanah. Adapun peningkatan realisasi penerimaan pajak air bawah tanah kota Pekanbaru setiap tahunnya dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru. Dapat disimpulkan bahwa pajak air bawah tanah memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan kota Pekanbaru.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak air bawah tanah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru 2018 - 2019?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh BAPENDA kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemungutan pajak air bawah tanah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apa upaya yang dilakukan BAPENDA kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak air bawah tanah sebagai salah satu sumber Pendaapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru tahun 2018 – 2019.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian dibatasi hanya sampai pada informasi yang berhubungan dengan penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2018-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai Berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagi Penulis

Sebagai alat untuk meninjau,serta mempraktekkan teori-teori yang didapat dan dipelajari dibangku kuliah yang kemudian dibandingkan dengan penerapan opada perusahaan,sehingga penulis dapat menegetahui seberapa jauh pahaman dan penjabaran yang penulis dapat lakukan terhadap teori yang diketahui.

2. Manfaat bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru

Sebaga bahan masukan dan bahan kajian bagi badan pengelolaan pajak daerah Kota Pekanbaru untuk dapat dipergunakan seperlunya dan bermanfaat bagi Kota Pekanbaru dan masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian jelas mengenai dasar suatu penulisan.

Adapun sistematika penulisan tugas akhir secara umum penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru. Seperti sejarah singkat berdirinya BAPENDA, visi dan misi, uraian tugas masing-masing bidang di instansi serta struktur organisasi BAPENDA kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk BAPENDA kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daerah Kotamadya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Penangihan, Unit Penyuluhan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 diganti dengan nama Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

2.2.1 Visi :

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

2.2.2 Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi dari sebuah instansi tersebut. Terdapat beberapa Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan dibidang pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

2.3.1 Kepala Badan

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
 - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
 - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
 - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
 - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3 Sub Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3.4 Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
 - e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Pelaksanaan akuntansi badan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.5 Sub Bagian Program

1. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.6 Bidang Pajak Daerah I

1. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
 - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
 - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran da pendataan.
 - e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
 - f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
 - g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
 - h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak Daerah I membawahi :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
 - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

2.3.7 Bidang Pajak Daerah II

1. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
2. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
 - i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang pajak daerah II, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
 - c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
 4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

2.3.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah

1. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.
2. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan.
 - c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

2.3.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
 - c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
 - e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.
 - f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
 - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
 - i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
 - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
 - c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
 4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3.10 Unit Pelaksanaan Teknis

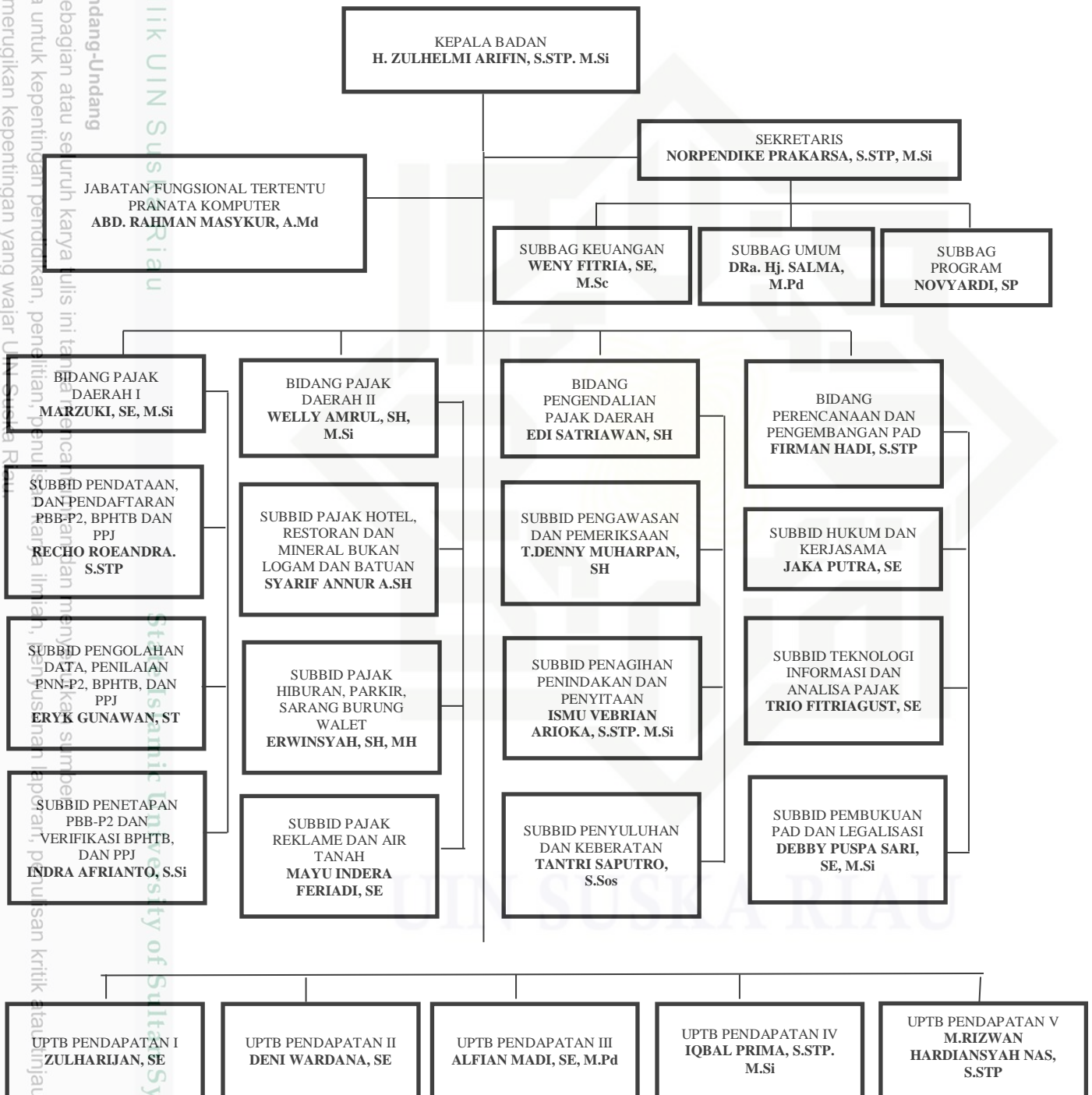
1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar.
 - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
3. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

2.3.11 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Stuktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah wajib pajak air bawah tanah kota Pekanbaru pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 826 wajib pajak aktif bayar dari total 2.145 wajib pajak. Sementara ada 1.299 wajib pajak yang belum bayar atau belum terverifikasi dan 20 wajib pajak lainnya sudah tutup. Di tahun 2019 mengalami peningkatan wajib pajak yang aktif bayar sebanyak 1.115 wajib pajak dari total 2.212 wajib pajak. Adapun 526 wajib pajak belum bayar atau belum verifikasi dan 571 wajib pajak lainnya sudah tutup.
2. Kontribusi pajak air bawah tanah terhadap PAD kota Pekanbaru pada tahun 2018-2019 berturut-turut sebesar 16,14% dan 17,16% dengan rata-rata sebesar 16,65. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air bawah tanah memberikan pengaruh yang besar terhadap PAD di kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2018-2019. Dan ini berarti bahwa pemerintah kota Pekanbaru mampu dalam melaksanakan kinerja keuangan dalam menggali potensi penerimaan pajak air bawah tanah secara efektif.



4.2. Saran

Untuk meningkatkan penerimaan PAD diperlukan peran pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada penerimaan PAD sehingga penerimaan PAD dapat ditingkatkan lagi. Dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Melakukan evaluasi kinerja guna mengetahui pegawai yang ulet dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
2. Adanya keterbukaan antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja antara satu dengan yang lainnya.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan program sosialisasi baik langsung maupun menggunakan media.
4. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, agar dapat mendorong wajib pajak membayar kewajibannya dengan tepat waktu.
5. Agar menertibkan para wajib pajak, pemerintah Kota Pekanbaru harus konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak.
6. Membrikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh membayar kewajiban perpajakannya, dan dengan demikian wajib pajak dapat termotivasi untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abiddin, Khoirul. 2017. *“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru”*. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Darwin. 2010. *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. 2010. *“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mahmudi. 2019. *“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi keempat”*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YYKPN.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
- Resmi, Siti. 2017. *“Perpajakan teori dan kasus (edisi 4 buku 1)”*. Jakarta: Salemba Empat
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *“Perpajakan di Indonesia: Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni, Nita. 2018. *“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP”*. Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/32172
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1491/2020 Tanggal 12 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

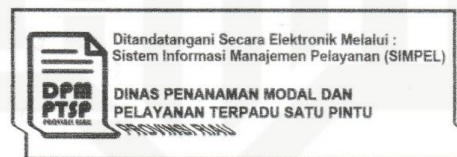
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : YOLLANDA ANDINI SARI |
| 2. NIM / KTP | : 01776201266 |
| 3. Program Studi | : D 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Maret 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1491/2020 Pekanbaru, 12 Maret 2020 M
Sifat : Biasa 17 Rajab 1441 H
Lampiran : -
Halaman : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Yollanda Andini Sari
NIM. : 01776201266
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "**Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



[Signature]
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1082



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32172 tanggal 17 Maret 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : YOLLANDA ANDINI SARI
2. NIM : 01776201266
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
5. Jenjang : DIII
6. Alamat : JL. CIPTA KARYA GG. NIKMAT 05 KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Maret 2020

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru,
Sekretaris



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.037.870.534,336.00	492.212.805,175.71	870.406.974,034.00	482.735.877,871.27	1.148.930.500,037.00	577.923.439,707.33	1.085.555.818,588.00	573.154.196,274.82	963.784.076,614.00	690.931.414,829.75
2. PAJAK DAERAH	607.142.075,491.00	357.365,525,616.00	537.699,452,843.00	390.323,492,883.50	783.260,311,972.00	491,289,420,935.00	847,384,410,838.00	499,533,628,098.00	784,862,467,046.00	620,937,643,530.00
3. RETRIBUSI DAERAH	326,038,249,569.00	77,157,903,921.00	243,782,499,358.00	51,858,962,166.00	175,007,333,790.00	56,899,895,111.00	189,765,964,260.00	49,197,253,548.77	129,987,773,611.00	36,004,340,167.54
4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH	83,740,209,276.00	50,055,635,317.71	79,595,021,833.00	17,486,938,234.77	184,852,506,022.00	25,312,584,005.33	42,547,725,050.00	19,589,645,299.05	22,120,068,787.00	29,349,258,535.21
5. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DISAHKAN	14,950,000,000.00	7,633,740,321.00	9,330,000,000.00	3,067,484,587.00	5,810,291,253.00	4,461,530,655.00	5,857,718,440.00	4,756,435,349.00	4,357,718,440.00	4,640,172,597.00

Pekanbaru, April 2020

KEPALA SEKSI PEMBUKUAN PAD DAN LEGALISASI

DEBBI PUSPA SARI, S.M.Si
NIP. 19770822 20012 2 001

Undang-Undang

bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

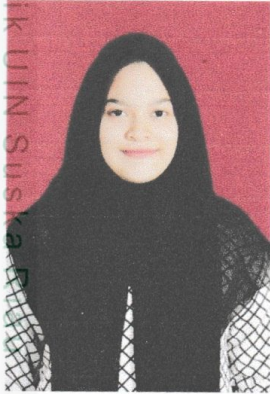
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Yollanda Andini Sari , Lahir di Pekanbaru, 07 Juli 1998. Yang merupakan Anak KeTiga dari 3 (Tiga) bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Darius dan Ibu EviWati . Dan mempunyai kakak / Saudara perempuan dan Laki-laki yang bernama Dewi Yurfita dan Abang laki-laki Afrizal. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SDN 030 Kota Pekanbaru pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 20 Kota Pekanbaru lulus pada tahun 2014 selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 15 Kota Pekanbaru , dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Mengambil Program Studi D3 Perpajakan pada tahun 2017 dengan gelar ahli madya (Amd) telah didapatkan dan lulus pada tanggal 29 desember 2020 penulis menyelesaikan D3 dengan judul tugas akhir : “ **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU**”